

**SKRIPSI**

**KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF POLITIK DI PERSYARIKATAN  
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BONE**

**TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN**

**Nomor Stambuk: 105640219615**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF POLITIK  
DI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BONE

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN

Nomor Stambuk: 105640 2196 15

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

## PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di  
Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone  
Nama Mahasiswa : Tenriawaru Septiananinda Amran  
Nomor Stambuk : 105640219615  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,  
Pembimbing I Pembimbing II  
  
**Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si**  
  
**M. Amin Umar, S.Ag. M.Pd.I**  
Mengetahui,  
Dekan Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus Tahun 2019.



**TIM PENILAI**

Ketua Sekretaris

**Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si.** **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.**

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (  )
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (  )
3. M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I (  )
4. Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si. (  )

## PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tenriwaru Septiananinda Amran

Nomor Stambuk : 10564 02196 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar Akademik.

Makassar, 26 Agustus 2019

Yang Menyatakan

Tenriwaru Septiananinda Amran

## ABSTRAK

**Tenriawaru Septiananinda Amran, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone** (di bimbing oleh Hj. Budi Setiawati dan M. Amin Umar)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone. Jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tipe penelitian ini menggunakan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun bukan berarti persyarikatan ini antipolitik dan tidak paham politik. Melihat kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah sebenarnya tidak dipermasalahkan, namun di lingkup politik kesetaraan gender dalam perspektif politik masih sekedar wacana, (1) akses : setiap anggota Muhammadiyah diberi akses atau jalan untuk berpolitik dengan cara memberikan pelatihan mengenai perempuan dan politik, (2) kontrol : pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan Nomor 41/KEP/1.0/B/2013 sebagai bentuk untuk mengontrol anggota yang masuk menjadi caleg, (3) partisipasi : Partisipasi anggota Aisyiyah sampai sekarang masih minim itu disebabkan karena adanya pemikiran seperti yang di jelaskan pada respon sebelumnya bahwa perempuan masih berfikir tentang budaya patriarki, (4) manfaat : Muhammadiyah memberikan manfaat seperti program-program pelaksanaan kesetaraan gender yaitu pemberian pendidikan HAM, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan politik.

**Kata Kunci** : Muhammadiyah, Kesetaraan Gender, Perspektif Politik

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan V Kesimpulan dan Saran.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar.

Dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si** selaku pembimbing I dan bapak **M. Amin Umar, S.Ag. M.Pdi** yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan Skripsi sehingga ini dapat di selesaikan, selain itu juga tidak lupa mengucapkan kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kedua Orang Tua saya Drs. Amran Ramli M.M dan Dra. Jumriaty S.pd M.M yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan

yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaan (S1) sehingga ada semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr, H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bone Drs. H. M. Tahir Arfah M.Pdi, Hj. Murni, Mastiawati, S.H, Badaruddin Baso Om, S.E M.M, Herman S.T telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan informasi yang akurat selama proses penelitian berlangsung
7. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2006-2018, terutama angkatan 2015, selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan, memberikan doa dan motivasi.
8. Kepada sahabat-sahabat saya, Andi Dewi Riana, Andi Sry Rahayu Amir, Andi Firda Anugriani, Ulva Putri Ayu Ningsih, Wahyuni Edi, yang selama ini selalu mendukung, menemani saya dalam suka dan duka sehingga skripsi ini dapat selesai.

9. Kepada saudara-saudara saya tercinta Selvy Octavia Mulawardani Amran S.Pd, Muhammad Afriansyah Tri Saputra Amran, Rya Septiana Khaeril S.Pd, Andi Tenri Rezki Mayapada Razak S.Ap, Harnani Rudi, Nunung Pratiwi, Andi Muliadi Syam, Muhammad khairy Akram, Syahrul Ardiansyah yang selalu menemani dan memberikan masukan mensupport saat saya mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai dalam suka maupun duka.
10. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas seluruh bantuannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya Aamiin.

Makassar, 26 Agustus 2019

Tenriawaru Septiananinda Amran

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENERIMAAN TIM .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian Gender .....	7
B. Pengertian Kesetaraan Gender .....	12
C. Pengertian Politik .....	14
D. Gender dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah .....	16
E. Politik dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah .....	19
F. Penelitian Terdahulu .....	24
G. Kerang Fikir .....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	29
A. Waktudan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Informan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone .....	42
C. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Bone .....	49
BAB V .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
JURNAL .....	64
UNDANG-UNDANG .....	65
LAMPIRAN .....	66
RIWAYAT HIDUP .....	

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perbedaan Seks Dan Gender.....	7
Table 3.1 Daftar Informan.....	31
Table 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Bone.....	38
Table 4.2 Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah .....	45
Table 4.3 Koordinator Majelis Dan Tarjih.....	46
Table 4.4 Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Fikir .....27



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan menerapkan sistem demokrasi, dimana hak untuk dipilih dan memilih tentu menjadi sebuah keunggulan di dalamnya. Namun yang terjadi saat ini politik menjadi suatu hal yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya bagi para perempuan. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial dalam terjadinya praktik kebebasan politik. Baik secara bebas ataupun setara. Dalam kondisi warna Negara diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum.

Politik secara umum di definisikan sebagai ilmu dan sebagai seni maupun praktik tentang pemerintah yang di dalamnya terdapat aspek kekuasaan yang terorganisir, institusi-institusi kekuasaan, ataupun perlawanan-perlawanan. Ketika berbicara politik orang kemudian merujuk pada partai politik, lembaga eksekutif atau legislatif. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia adalah *homo politicus*, yang berarti bahwa mereka memiliki kecenderungan berpolitik dalam kehidupan sehari-hari.

Politik adalah unsur yang penting dalam pemerintahan suatu Negara. Politik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan, dan

lain-lain. Konsep politik tersebut mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori berbeda yang terimplikasi di dalamnya misalnya, gender, kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya.

Berbicara persoalan gender memang tidak akan pernah ada habisnya, teramat banyak kajian-kajian atau penelitian tentang gender namun dalam khalayak banyak perbincangan yang sudah semakin merebak, namun dalam realitanya masih sering terjadi kesalahpahaman tentang konsep gender.

*Gender* menjadi aspek dominan dalam definisi politik tersebut. Dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih *real* dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Dimensi-dimensi yang dapat menjadi dasar analisis terhadap relasi gender dan politik pun beragam, mulai dari dimensi kultural, ideologis, sampai historis. Hubungan gender dengan politik ini penting untuk dicermati karena banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat bertolak dari ketimpangan hubungan keduanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen (Kertati, 2014:21). Salah

satu alasan klasik yang menjadi kambing hitam dari ketertinggalan politik perempuan adalah soal budaya patriarki, yakni perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (*privat*) sementara laki-laki wilayah publik. Keberpihakan parpol terhadap kesetaraan gender terlihat masih setengah hati. Setiap jelang pemilu hampir semua parpol mencoba untuk mengadopsi perspektif gender (*gender perspective*). Namun, niat tersebut tampak tidak benar-benar tulus lantaran motif gender perspective hanya ingin mempertahankan eksistensi partai supaya sesuai dengan persyaratan UU, padahal keterwakilan perempuan menjadi krusial mengingat keputusan di eksekutif dan legislatif mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Demikian pula di parlemen (DPR), perempuan berusaha untuk memperoleh “kursi” agar dapat duduk di parlemen dengan tujuan dapat menyampaikan aspirasi perempuan. Keterwakilan perempuan dalam arena politik (parlemen, DPR) mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Keterwakilan perempuan yang terendah ada pada DPR 1050-1995 (3,7%) (Agustina dalam Adeni dan Harahap, 2018:2) dan tertinggi pada DPR 2009- 2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86% dan menurun di periode 2014-2019 menjadi 17,32% atau sebanyak 97 orang (Databoks dalam Adeni dan Harahap, 2018:2).

Data tersebut memperlihatkan bahwa kuota 30% perempuan di parlemen belum dapat direalisasikan. Laporan perkembangan PBB pada tahun 1995 yang menganalisis gender dan pembangunan di 174 negara menyatakan bahwa:

“Meskipun benar bahwa tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antar tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, tetapi 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik” (Suryani dalam Adeni dan Harahap 2018:2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Data Caleg DPRD Kabupaten Bone	Jumlah
Laki-laki	441 orang
Perempuan	120 orang
Jumlah	571 orang

Sumber: KPU Kabupaten Bone

Data Anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2019-2014	Jumlah
Laki-laki	41 orang
Perempuan	4 orang
Jumlah	45 orang

Sumber: KPU Kabupaten Bone

Data caleg Kabupaten Bone secara keseluruhan di lima dapil ada 571, 120 Perempuan, dan 441 Laki-laki, dan data caleg yang lolos 4 Perempuan, 41 Laki-

laki. Dapil (1) 10 kursi, dapil (2) 8 kursi, dapil (3) 9 kursi, dapil (4) 8 kursi, dapil (5) 10 kursi.

Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bone sangat terbuka terhadap peran politik perempuan. 'Aisyiyah berpandangan bahwa tidak ada larangan dalam islam dan budaya masyarakat Indonesia bagi perempuan untuk berperan di ruang publik, baik untuk menjadi anggota dewan maupun kepala Negara.

Menurut pengamatan sementara penulis menyatakan bahwa Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang juga menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014 namun kuota yang terpenuhi hanya 27,78%, artinya belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan, maka dari itu peran perempuan dalam dunia politik nampaknya masih sekadar diskursus. Dalam dunia politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan lainnya. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Penulis sangat menyayangkan karena perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa perempuan dan politik dalam perspektife kesetaraan gender harus seimbang dan berimbang tanpa melupakan hakekat dan kodratnya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF POLITIK DI MUHAMMADIYAH KABUPATEN BONE".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan di atas yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kesetaraan Gender dalam Pespektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone dilihat dari aspek : akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang ingin di capai, dan adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesetaraan Gender dalam Pespektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pemerintahan, khususnya bagi para Mahasiswa yang meneliti atau mengkaji objek yang sama. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Kesetaraan Gender dalam Pespektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di suatu daerah pada masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi bahwa di dalam dunia politik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Gender

Kata Gender dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari Bahasa Inggris, kalau di lihat dalam kamus tidak secara jelas dibedakan kata seks dan gender. Untuk memperjelas perbedaan seks dan gender berikut ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Perbedaan Seks dan Gender**

No	Seks	Gender
1	Tidak bisa diubah	Bisa berubah
2	Tidak bisa dipertukarkan	Bisa dipertukarkan
3	Berlaku sepanjang masa	Bergantung budaya masing-masing
4	Berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja	Bergantung budaya masing-masing
5	Ditentukan oleh Tuhan atau kodrat	Berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya, bukan kodrat tapi buatan masyarakat

Sumber : Bahan Materi Pentaloa (Pengarusutamaan Gender bagi Perencanaan

Sektor Tingkat Kabupaten/Kota, 2003)

Dalam memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin “merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu”. (Fakih dalam Suryani, 2010:7). Jenis

kelamin merupakan kodrat dari tuhan yang tidak bisa dipertukarkan ataupun diganti, perempuan menghasilkan sel telur sedangkan laki-laki sperma.

Konsep Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang di konstruksikan secara social maupun kultural. Bahwa perempuan itu di kenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki di anggap kuat , rasional, jantan, dan perkasa Handayani dalam (alfian, 2016:2)

Konsep Gender yang dikembangkan Hubies melalui Anshori dkk, dalam (alfian, 2016:4) meliputi:

- 1) *Gender difference*, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin.
- 2) *Gender gap*, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- 3) *Genderization*, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
- 4) *Gender identity*, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelaminnya.
- 5) *Gender role*, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut.

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh

tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Puspitawati, 2012:1)

*‘Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men’s and women’s lives “individually over the life course and structurally in the historical context of race and class” Ferree dalam* (Puspitawati, 2012:2) (Gender bukan merupakan property individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual<sup>6</sup> sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas).

Konsep gender adalah sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sejarah perbedaan gender antara manusia dan laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Maka, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan bahkan oleh Negara. Fakhri dalam (Susanti, 2013:715)

Gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan

fleksibilitas yang dinamis. Dalam pengertian ini, ajaran Islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut dengan *mustaqin*, (2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifa di muka bumi sama-sama memiliki tugas memakmurkan bumi, (3) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian pramordial, (4) laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis, (5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi (Wahid, 2012:241)

Gender ialah konstruksi sosial dan budaya yang melahirkan sifat yang melekat bagi laki-laki dan perempuan Fakih dalam (Nasip, 2017:42). Selain itu, gender juga dipahami sebagai jenis kelamin yang didasarkan pada aspek sosial, budaya, politik, dan agama yang direpresentasikan melalui kekuatan fisik perempuan dan laki-laki Hasym dalam (Nasip, 2017:42).

Istilah "*gender*" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1986) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. (Riant Nugroho, 2011:3)

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

Dalam hal ini, konsep gender yang dimaksud adalah bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang melahirkan sifat yang melekat bagi laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosial, budaya, politik, dan agama sebagai manifestasi kesadaran sistem kognitif yang tercipta dari suatu kelompok masyarakat dalam memahami lingkungannya.

## B. Pengertian Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing (Riant Nugroho, 2008:59)

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan

dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ibid dalam (Silvana, 2013:11)

Kesetaraan Gender Pengertian secara harfiah kata setara disebut juga dengan seimbang, tidak berat sebelah dan tidak membeda-bedakan. Kalau dikaitkan dengan gender berarti tidak melihat dari jenis kelamin yang bersifat biologis akan tetapi dilihat dari kemampuan dan kualitas dari seseorang. (Suryani, 2010:8)

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kesetaraan Gender adalah: “Kesamaan Kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hankamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut”. Men-PP dalam (Suryani, 2010:8)

Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, control, partisipasi, manfaat yang sama dalam mewujudkan pembangunan. Penilaian dan penghargaan yang sama diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka jalankan. (Suryani, 2010:8)

Kesetaraan Gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial,

(4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. (Nasaruddin, 2001:247)

### C. Pengertian Politik

Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggara Negara atau sistem pemerintahan. Dalam kamus Litre (1870) misalnya, politik didefinisikan sebagai “ilmu memerintah dan mengatur Negara” sementara dalam kamus Robert definisi politik adalah “seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.” (Tijani, 2001:3)

(Carlton Clymer Rodee et al, 2002:2-3) kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara-kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.

Definisi politik dari (Gabriel A. Almond et.al, 2004:2) *“the activities associated with the control of public decisions among a given people and in a given territory, where this control may be backed up by authoritative and coercive means. Politics refers to the use of these authoritative and coercive means who gets to employ them and for what purposes.”* kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada

penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

Nimmo dalam (Adeni dan Harahap, 1989:4) Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana, pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan pengaruh tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan untuk memperluas tindakan lainnya. Dari semua padangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang. Politik adalah kegiatan.

Sistem politik Indonesia merupakan rangkaian satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan, sistem politik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari masa kerajaan, masa kolonialisme, masa orde lama, masa orde baru, dan masa setelah reformasi dan kesemuanya dipengaruhi oleh faktor pemerintahan yang berlaku. Sistem politik Indonesia terdiri dari beberapa lembaga tinggi Negara, partai politik dan pemilu, hukum serta pemerintahan daerah (Camela, 2018:1)

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.

Berdasar pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam

melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang dipakai untuk mmebina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

#### **D. Perempuan dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah**

Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan menarik untuk melihat kembali keberhasilan pemimpin perempuan di masa yang lalu. Sebagai contoh adalah Ratu Balqis di Saba' yang kedigdayaannya membuat Nabi Sulaiman AS merasa perlu untuk menaklukkan Ratu Balqis dan bala tentaranya. Hal lain yang semakin menguatkan keinginan Nabi Sulaiman AS adalah kenyataan bahwa Ratu Balqis dan bala tentaranya belum menyembah Allah, alias masih tunduk kepada matahari yang sebenarnya hanyalah ciptaan Allah (QS. an-Naml [27]: 23). Lepas dari pergulatan akidahnya tersebut, Ratu Balqis bagaimanapun adalah pemimpin perempuan yang ulung dan hebat.

Menurut KH. Husein Muhammad, keberhasilan kepemimpinan Ratu Balqis dikarenakan dia mampu mengatur kaumnya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Selain Ratu Balqis, banyak pemimpin perempuan lain di masa modern yang kepemimpinannya relatif sukses. Indira Gandhi, Margaret Tacher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia adalah contoh dari mereka yang sukses tersebut (Muhammad, 2012). Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya perempuan juga memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memimpin, sekaligus menjadi pemimpin yang sukses. Sebagai pembandingan dari pemaparan di atas, ada sebuah hadits yang cukup masyhur yang menyatakan bahwa kaum (manapun) yang menyerahkan (semua) urusannya

kepada perempuan (mana saja) tidak akan menemui keberuntungan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah sendiri baru menyampaikan hadits tersebut 23 tahun setelah Rasulullah wafat, di saat terjadi kemelut peperangan antara Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal (Mulia, 2005). Selain “bertentangan” dengan fakta-fakta sejarah yang ada (Muhammad, 2012), hadits tersebut juga mengandung kelemahan dari sisi periwayatan (bukan dha’if, tetapi tergolong hadits āhād) (Mulia, 2005). Selain dari pada itu, masalah kepemimpinan (kecuali dalam masalah shalat) termasuk dalam wilayah ijthādiyyah yang formasinya tidak harus begini dan begitu. Oleh karena itulah, kepemimpinan perempuan itu sendiri adalah bagian dari wilayah “abu-abu” yang pada dasarnya sama dengan kepemimpinan laki-laki itu sendiri. Sejalan dengan itu, terdapat ayat Al-Qur’an (QS. an-Nisā’ [4]: 34)—darinya muncul istilah qawāmah—yang sebenarnya secara spesifik berbicara dalam konteks rumah tangga namun karena kesalahpahaman dibawa(-bawa) dalam konteks yang lebih luas. Singkatnya, ada generalisasi ayat yang sebenarnya dalam kondisi ini tidak tepat dan bermasalah. Menarik untuk merujuk pemaparan M. Quraish Shihab dalam memahami arti qawāmah, yang bagi penulis mengandung makna tersirat untuk mengendalikan “superioritas” laki-laki. Menurutnya, qawāmah juga ber-arti pemenuhan kebutuhan, perha-tian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Oleh karena itulah, simpulnya, kepemimpinan dalam rumah tangga yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki tidak semestinya menghantarkan kepada kesewenang-wenangan (Shihab, 2005). Sejalan dengan itu, kepemimpinan (qawāmah) tersebut justru menjadikan laki-laki benar-benar

bertanggung jawab dan bersikap adil serta ideal terhadap perempuan. Nuansa keadilan itu terwujud dalam hal suami memberikan keluasan dan ruang bagi istrinya untuk berkarya dan berkarir. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak harus bersifat formal. Kemampuan seorang istri untuk bersikap lemah lembut sehingga menyentuh kalbu, dan berargumentasi secara kuat sehingga menyentuh nalar juga merupakan bagian keterampilan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.

Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menjadi semakin terasah ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan pasangan hidupnya (suami). Sebab, kepemimpinan juga berarti, "Kemampuan mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela kepada tujuan yang ingin dicapai." Asma Barlas (2003) dalam bukunya yang sudah diterjemahkan, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, menegaskan bahwa pembacaan terhadap Al-Qur'an tidak semestinya terus dilakukan dalam frame patriarki. Sebaliknya, Al-Qur'an harus dibaca dengan semangat pembebasan, yang salah satunya adalah pembacaan yang antipatriarki. Dalam bukunya tersebut, sebagaimana dituturkan oleh Syafiq Hasyim dalam pengantarnya, Barlas ingin menegaskan dua hal. Pertama, menentang pembacaan Al-Qur'an yang menindas perempuan. Kedua, menawarkan pembacaan Al-Qur'an yang mendukung bahwa perempuan dapat berjuang untuk kesetaraan dalam kerangka ajaran Al-Qur'an. Menurut Barlas, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas agensi, pilihan, dan individualitas moral yang sama.

Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan. Pertama, Al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta standar penilaian yang sama bagi keduanya. Artinya, Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin (QS. an-Nahl [16]: 97). Kedua, Al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain (QS. at-Taubah [9]: 71). Hal ini ditengarai dengan Al-Qur'an menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain. Selibhnya, tuntutan pembacaan yang lebih adil itu sendiri sebenarnya tidak diniatkan untuk membalik logika dengan sedemikian rupa. Hal ini dilakukan untuk lebih mendapatkan simpulan yang seimbang dan karenanya menguntungkan semua pihak serta tidak mendhalimi pihak manapun

#### **E. Gender dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah**

Secara operasional, muatan gender banyak di temukan dalam keputusan muktamar sebagai “permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan” disamping itu, dalam batasan tertentu, terutama menyangkut masalah perempuan dan keluarga, keputusan muktamar Aisyiyah juga memiliki posisi organisatoris yang sama. Kedua muktamar tersebut merupakan artikulasi dari aspek yang diistilah Gramsci sebagai *historically organic ideology* yang memuat nilai dasar, visi, misidan norma yang direproduksi secara struktural oleh Muhammadiyah. Penegasan status yang berimplikasi pada peran laki-laki dan perempuan di Muhammadiyah akan diklarifikasi berdasarkan keputusan muktamar Muhammadiyah dan muktama organisasi otonom (ortom) n, utamanya Aisyiyah

serta Nasyyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan sebagainya sebagai pembanding (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005:573).

(Wahid, 2012:241) Sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung dalam kajian hukum dan melahirkan tuntuna hukum, produk Majelis Tarjih dapat dikelompokkan sebagai hasil pemikiran dalam bidang hukum. Meskipun berbasiskan teks-teks keagamaan berupa Al-Qur'an dan Al- Hadis, pada hakekatnya fiqh adalah ekspresi pemikiran atau buah intelektual manusia sebagai hasil interpretasi dialogis antara persoalan-persoalan yang mengedepan dengan teks-teks dimaksud. Ini berarti sebagai buah pemikiran fiqh hadir tidak dalam ruang dan waktu yang *vacum*. Dalam ungkapan lain sebagai karya intelektual fiqh senyatanya bergumul dengan fakta-fakta yang hidup di tengah masyarakat yang mengitari kemunculannya. Ketika fakta-fakta yang muncul di tengah kehidupan di setiap tempat dan waktu muncul silih berganti dan beragam maka menghadirkan fiqh produk zaman klasik yang mengusung semangat zamannya yang khas, yang tidak jarang sarat dengan aroma yang *misoginis*, pada era kekinian adalah sebuah sikap pemaksaan intelektual. Dengan demikian memunculkan fiqh yang merespon semangat kekinian, meskipun tidak mudah, adalah salah satu upaya yang niscaya karena merupakan satu dari sekian alternative panduan lahirnya relasi antar manusia yang lebih "sehat" yang pada gilirannya berujung dengan munculnya generasi yang lebih berkualitas. Karena itu memperjuangkan hadirnya fiqh dengan tampilannya yang humanistik, egaliter, demokratis, dan berkeadilan dapat disejajarkan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang bersifat luas yang bertumpu pada perbedaan etnis, ras, agama, dan kawasan. Karena itu sekecil

apapun upaya yang mengarah ke fiqh model demikian dapat dinilai sebagai jihad intelektual yang sangat mulia yang patut dicatat dalam lembaran sejarah umat manusia.

Beranjak dari keterangan di atas, kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan yang diwujudkan dalam pembahasannya tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan perempuan dalam ibadah (khususnya hukuman perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah yang di dalamnya terdapat laki-laki), kajian Muhammadiyah yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Hal itu terlihat pada semangat yang ditampilkan putusan, fatwa serta wacana yang disajikan yang memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan sebagaimana halnya laki-laki. Apresiasi terhadap kesetaraan gender dalam kajian Majelis Tarjih di atas semakin bermakna jika memperhatikan lahirnya putusan putusan hukum perempuan menjadi hakim dan perempuan aktif di dunia perpolitikan mendahului pembahasan yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga sejenis di Indonesia. Hal yang juga patut diberikan catatan penting dalam rangkaian kajian di atas adalah keberpihakan tersebut secara cerdas dilandasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dirujuk sebagai panduan alur dari argumentasi yang digunakan untuk putusan-putusannya. Berkenaan dengan hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah (yang di dalamnya terdapat) laki-laki, dapat pula dicatat sebagai keberanian Majelis Tarjih untuk lagi-lagi berpihak pada kesetaraan. Karena, meskipun persoalan ini bukan persoalan relatif baru namun menghadirkannya di

hadapan ummat yang telah terbiasa dengan panduan fiqh yang “baku”, bukanlah upaya yang mudah dan karenanya pula patut diapresiasi. (Wahid, 2012:242)

Gender yang tercakup dalam Anggaran Dasar, Keputusan muktamar dan doktrin-doktrin Muhammadiyah lain membentuk rezim gender formal Muhammadiyah. Gender Muhammadiyah mencakup aspek emansipatif dan aspek restriktif, aspek emansipatif sangat menonjol pada awal berdirinya Muhammadiyah yang mengadopsi konsep emansipasi kolonial yang dijustifikasi dengan ajaran-ajaran Islam yang relevan melalui pendekatan rasional-modernis. Disamping sistem pendidikan yang memicu ketegangan dengan kelompok Islam konservatif, isu perempuan yang menimbulkan gejolak sosial dimasanya, misalnya, kebolehan perempuan mengajar laki-laki perempuan bepergian tanpa mahram dan pendirian langgar isteri yang memberi otonomi spiritual bagi perempuan dan aktivitas sosial yang seimbang Keputusan Majelis Tarjih tahun 2010 dapat dipandang sebagai proses emansipasi perempuan Muhammadiyah melintas mellenium kedua, sebaliknya, rezim itu juga memunculkan beberapa restriksi dan larangan seperti aurat, segregasi pendidikan dan arak-arakan namun tidak secara konsisten dilaksanakan (Dzuhayatin, 2012:171)

Gerakan untuk menyadarkan betapa pentingnya peran wanita dalam kehidupan keluarga dan publik, hubungan non-diskriminatif dalam kehidupan sementara tidak atau belum memperoleh respon yang ikhlas dan mengembirakan. Artinya, negara juga masih mengapresiasi pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan (Abdullah, 2015:3)

#### **F. Politik dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah**

Dalam menyusun wacana pemikiran, termasuk di ranah politik, Muhammadiyah tidak mungkin melompat dari sesuatu yang kosong. Oleh sebab itu, apa yang berlaku di era klasik perlu ditinjau selintas. Adalah Abu al-Hasan alMawardi (974-1058 M) yang membuka diskusi teologi politiknya dalam sebuah pernyataan terkenal yang berbunyi: “Al-imâmah maudhū’atun likhilâfati alnubuwwah fi hirâsati al-dîn wa siyâsati al-dunyâ.” Kepemimpinan politik dilembagakan sebagai pengganti peran kenabian untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia (Al-Mawardi dan Al-Sultaniyah 1881:3)

Muhammadiyah sejak berdirinya dikenal sebagai sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. Secara normatif Muhammadiyah tidak bermain di lapangan politik serta memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik. Muhammadiyah mampu memagari dirinya dari politik dengan Khittah (garis perjuangan) yang terpatri dalam tubuh organisasi ini. Sikap netral terhadap partai yang diputuskan melalui Muktamar ke 38 Makasar terus dipertahankan. Prinsip netral terhadap partai sebagai upaya menghindari benturan antara kepentingan antara kecenderungan kultural dan struktural (Khoiri, 2013:171). Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut ”khittah” (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada khittah ini terlihat dari: Khittah Palembang (1956-1959), khittah Ponorogo (1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Denpasar (2002).

Sebagai gerakan Islam non-politik, Muhammadiyah dalam AD (Anggaran Dasar) 1912, Artikel 2a merumuskan tujuan berdirinya: “menyebarkan pengajaran

Agama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumipitera di dalam residensi Yogyakarta. Dua tahun kemudian dalam AD 1914, Artikel 2a, perumusan tujuan itu mengalami perubahan yang cukup penting: "memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama Islam di Hindia Netherland" perubahan AD yang fundamental tentang tujuan organisasi terjadi pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-31 (21-26 Desember 1950) di Jogjakartadalam iklim pasca revolusi kemerdekaan yang mulai bersinggung dengan teologi politik. Dalam pasal 2 tujuan itu dirumuskan berikut: "Maksud dan tujuan Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (Djaidan Badawi 1998:1).

(Mawardi dan Sultaniyah dalam Qodir dkk, 2015:1) menyusun wacana pemikiran di ranah politik, Muhammadiyah tidak mungkin melompat dari sesuatu yang kosong Oleh sebab itu, apa yang berlaku di era klasik perlu ditinjau selintas. Adalah Abu al-Hasan al-Mawardi (974-1058 M) yang membuka diskusi teologi politiknya dalam sebuah pernyataan terkenal yang berbunyi: "Al-imâmah maudhû'atun likhilâfati alnubuwwah fi hirâsati al-dîn wa siyâsati al-dunyâ." Kepemimpinan politik dilembagakan sebagai pengganti peran kenabian untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia. Bagi al-Mawardi, masalah politik kenegaraan tidak bisa dipisahkan dengan peran yang pernah dijalankan oleh nabi di era Madinah (622-632 M). Sekalipun nabi telah wafat, masalah kepemimpinan komunitas Muslim harus dilanjutkan, sebab jika tidak demikian, sejarah Islam

sudah pasti lumpuh sejak masa-masa awal dengan segala masalah pelik yang menyertainya.

Pertanyaan tentang adakah budaya politik Muhammadiyah, bagaimanakah model, perkembangan, dan implikasinya merupakan perbincangan menarik, dalam konteks ini cenderung untuk melihat fenomena kemunculan Muhammadiyah tahun 1921 sebagai representasi dari gerakan kaum muslim kota yang berupaya merumuskan; pertama, jati dirinya dalam konteks keagamaan maupun agenda kebangsaan. Kedua, merumuskan identitas masyarakat atau bangsa yang hendak di tegakkan dan di bangun. Dua hal ini menjadi penting antara lain karena ini sekaligus menunjukkan keseriusan organisasi ini untuk menawarkan ideologi yang dianggap tepat bagi masyarakat maupun bangsa. Dalam kaitan ini maka paling tidak ada tiga perkembangan Muhammadiyah: pertama, face identifikasi diri. Pada fase ini, sebagai bagian dari revitalisme Islam awal abad XX, Muhammadiyah menampilkan dirinya sebagai gerakan Islam modern yang berbasis perkotaan dan menjanjikan perubahan. (Sudarnoto Abdul Hakim dalam Nashir, 2000:83)

Untuk mempertegas dimensi politik dari kebangkitan kultural Islam yang selama beberapa tahun belakangan ini bergerak secara impresif, adanya kesadaran bahwa ternyata tidak sedikit kelompok sosial yang termarginalisasi secara ekonomi politik. Akumulasi ekonomi politik di Muhammadiyah selama ini banyak terkonsentrasi dikelompok-kelompok tertentu saja sistem politik yang diterapkan nampaknya dinilai belum cukup secara maksimal mendorong terwujudnya perimbangan kekuatan ideal, keterbukaan politik, demokrasi dan

keikutsertaan masyarakat secara maksimal. Ketidak harmonisan hubungan umat Islam dan pemerintah secara tidak langsung mempersempit ruang dakwah Muhammadiyah melalui peran politik. Kondisi ini memberi pelajaran penting bagi Muhammadiyah untuk memformat ulang kiprahnya dalam panggung politik. Oleh sebab itu, tampilan wajah politik Muhammadiyah merupakan proses adaptasi dan akomodasi dari tampilan wajah politik periode yang dominan. Tampilan wajah ini berhasil menghidupkan kembali peran politik Muhammadiyah, dan juga memberi keleluasaan dalam mengembangkan dakwah melalui jalur politik, tanpa dicekam trauma sejarah yang pernah memarginalkannya. (Sudarnoto Abdul Hakim dalam Nashir, 2000:87)

Ada dua pendekatan yang dipakai Muhammadiyah dalam berkiprah di jalur politik, yaitu pendekatan *high politics* dan *allocative politics* pendekatan *high politics* berorientasi kepada tujuan-tujuan moral yang luhur, anggun, sesuai dan sebangun dengan martabat dan harkat manusia yang beriman. Sementara *allocative politics* adalah berpolitik untuk mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Sampai sekarang pendekatan politik Muhammadiyah ini berhasil melewati ujian meskipun politik di Indonesia mengalami pergeseran dan perubahan karakteristik rezim yang berkuasa, yang secara garis besar dibagi dalam dua periode, yakni periode politik otoriter (1966-1998) yang dikenal dengan sebutan orde baru, dan periode pasca baru atau lebih tepat dikategorikan sebagai transisi demokrasi (1998-2006), atau dikenal dengan reformasi. (Jurdi S, 2011:130)

Kepemimpinan Amien Rais (1994-1998) memperlihatkan corak menguatnya prinsip dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Di area kepemimpinan Amien Rais, Muhammadiyah bersikap lebih kritis, terutama dalam merespon persoalan ketimpangan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi bangsa. Warisan sikap akomodatif, koofratif, dan moderatif masih melekat, tetapi berkaitan dengan semangat *amar ma'ruf nahi munkar* kritisme sikap semakin menguat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Muhammadiyah melalui ketua umumnya, Amien Rais secara terbuka mengkritik kebijakan Pemerintah yang tidak populis dan merugikan rakyat Indonesia, seperti kasus busang dan *freeport*. Dengan lantang mengkritik roda pemerintahan orde baru yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berupa tuntutan subsidi kepemimpinan bangsa melalui gerakan reformasi. Kritik pedas dan terbuka ini tidak jarang membuat merah telinga rezim orde baru, dan bahkan sempat menimbulkan kerenggangan dan ketegangan. (Jurdi S, 2011:131)

Dinamika politik Muhammadiyah mulai tahun 1966-1968, melewati dua periode politik orde baru dan pasca orde baru (reformasi). Dinamika politik internal Muhammadiyah tersaji begitu mendalam melalui analisis yang akurat. Data yang diungkap juga cukup kuat mendukung analisis, dan berhasil mendiskripsikan dinamika politik Muhammadiyah dalam merespon dinamika politik di Indonesia secara utuh dan mendetail dalam setiap perkembangan yang terjadi. (Jurdi S, 2011:132)

Muhammadiyah seperti yang telah dibicarakan di muka bumi pernah secara sengaja mengartikulasikan konsepnya tentang teologi politik yang menjadi

pokok bahasan. Hal ini hanya bisa menafsirkan beberapa sinyal dari teologi politik Muhammadiyah itu yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan Negara.

### G. Penelitian Terdahulu

peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Gunawa Abdul Wahid pada tahun 2012 dengan judul *“Membaca Kepemimpinan Perempuan Dalam RUU Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah”*. Adapun kesimpulan penelitiannya adalah wawasan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan pada kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang disajikan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya di ruang publik. Bahkan memperhatikan waktu kemunculannya, kajian majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta menjadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam bidangnya. Melihat penelitian yang relevan diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan di lakukan. Penelitian tentang kesetaraan gender dalam perspektif politik di persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone lebih berfokus pada indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Sedangkan penelitian relevan di atas fokus kepada Rancangan Undang-Undang kesetaraan gender dalam keadilan gender

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Kurnia pada tahun 2011 dengan judul “*Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah Pemberdayaan Politik Perempuan*”. Adapun kesimpulan penelitiannya adalah keberadaan pemimpin perempuan tidak hanya dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, namun di luar itu Muhammadiyah dan juga Aisyiyah berpandangan bahwa tidak ada larangan dalam ajaran islam bagi perempuan untuk menjadi anggota dewan, kepala daerah bahkan kepala negara sekalipun. Sedangkan peneliti yang akan lakukan yaitu mengetahui Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Muhammadiyah Kabupaten Bone dengan 4 indikator yakni: Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

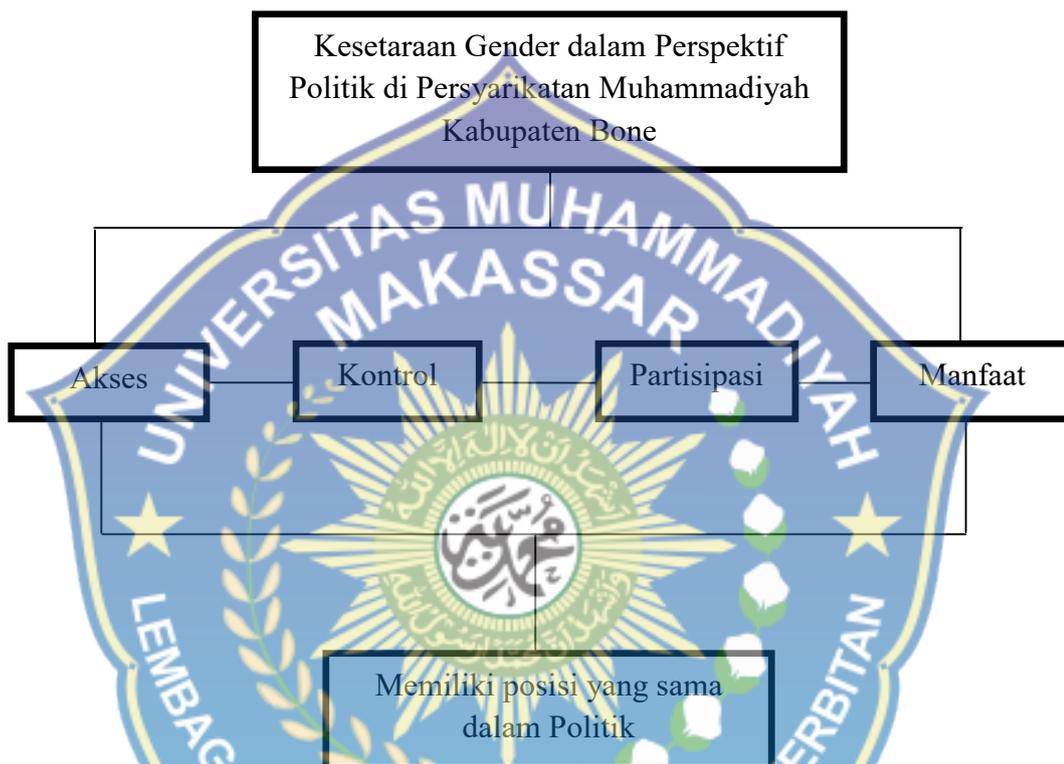
#### **H. Kerangka Fikir**

Kerangka fikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. (Burhan, 2017:71) kerangka fikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil peneltiian yang relevan atau terkait.

kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, control, partisipasi, manfaat yang sama dalam mewujudkan pembangunan. Penilaian dan penghargaan yang sama diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka jalankan. (Suryani, 2010:8)

Untuk mencapai kesetaraan gender (*gender equality*) di dalam dunia Politik, maka harus ada beberapa tahapan dan teknis akan dilalui. Lebih jelasnya di dalam kerangka fikir tersebut.

**Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir**



### **I. Fokus Penelitian**

Dari judul Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone dengan melihat dari Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat.

## J. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas yang menjadi deskripsi fokus penelitian adalah:

1. Akses : manfaat dari sesuatu kekuasaan
2. Kontrol : adalah mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem
3. Partisipasi : keterlibatan seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya
4. Manfaat : cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang di butuhkan oleh peneliti yaitu selama 2 bulan setelah seminar proposal mulai dari tanggal 13 Mei 2019 sampai tanggal 13 Juli 2019. Penelitian ini di laksanakan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Politik serta Kesetaran Gender dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Peran Gender dan Politik serta Kesetaran Gender dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah.

### C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ialah subjek darimana data dapat diperoleh. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan-informan kunci ataupun tokoh-tokoh historis dan yang masih aktif mengelol dan menjadi anggota Muhammadiyah

Dalam penelitian ini, sumber data primer dapat diperoleh dari pendiri/*founding father*, mantan-mantan pengurus maupun pengurus yang masih aktif, dan juga beberapa pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pendirian maupun aktivitas internal dan eksternal Muhammadiyah. Sedangkan data skunder didapat dari referensi-referensi muhammadiyah maupun sumber-sumber data lain yang dapat dipercaya. Dan juga dokumentasi-dokumentasi yang dianggap relevan untuk selanjutnya dapat dianalisis secara lebih mendalam

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini sampel yang diambil secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tidak harus mewakili dari seluruh populasi, sehingga sampel memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. H. M. Tahir Arfah M.Pdi	TA	Ketua Muhammadiyah Bone	1 Orang
2	Hj. Murni	HM	Ketua Aisyiyah Bone	1 Orang
3	Mastiawati, S.H	MW	Ketua Majelis Hukum dan Ham Aisyiyah Bone	1 Orang
4	Badaruddin Baso Om, S.E M.M	BB	Sekretaris Majelis Amal Usaha Muhammadiyah Bone	1 Orang
5	Herman S.T	HR	Anggota Legislatif Partai Pan	1 Orang
Jumlah			5 Orang	

Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pespektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dalam masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka di gunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada tempat penelitian (Nawawi, 1993:100). Dalam metode observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung pada objek dengan mencari informai lengkap mengenai permasalahan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone

##### **2. Wawancara**

Wawancara ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang di kerjakan secara sistematis dan berlandaska suatu tujuan peneliti (Hadi, 1993:193). Teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung dengan mendatangi lokasi Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Bone

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat di ambil untuk memperluas data yang nyata

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara deksriptif kualitatif dan interpretatif untuk mendapatkan suatu makna yang sesuai dengan kajian budaya di harapkan. Pengelolaan suatu data dalam penelitian kualitatif menurut (Nawawi, 1993) adalah suatu proses yang berlangsung serentak. Selanjutnya, berikut ini merupakan langkah-langkah suatu analisis data yang di gunakan (Miles dan Huberman, 1992)

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, atau mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data kemudian dapat di simpulkan . reduksi data di lakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, menelusuri tema, dan membuat sebuah gugus-gugus. Proses transformasi ini akan berlangsung terus sehingga laporan penulis lengkap tersusun.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ini merupakan suatu upaya penyusunan kumpulan suatu informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau

keputusan yang cocok. Kecenderungan kognitif manusia adalah menyederhanakan sebuah informasi yang kompleks dan jelas ke dalam suatu bentuk yang dapat di pahami. Hal ini merupakan cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid. Penyajian data ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang di rancang untuk menggabungkan informasi.

### 3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Dari pertama pengumpulan data ini, peneliti mulai mencari makna data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti ini mencari arti dan penjabarannya. Kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah di pahami dan di tafsirkan secara jelas. Data yang sudah terkumpul dan di susun ke dalam satuan-satuan, kemudian di kategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data tersebut di hubungkan dan di bandingkan antara satu atau dua yang lainnya sehingga mudah di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada. Kegiatan analisis data ini merupakan reduksi data, menyajikan, menyimpulkan secara bersamaan yang akan berlanjut dan berulang terus menerus

### G. Keabsahan Data

Validasi sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini, oleh karena itu di perlukan suatu teknik untuk memeriksa suatu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini di oeriksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yskni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari sumber data baik dengan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Adapun untuk penyajian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi menurut (Sugiono, 2015:273) yaitu suatu tehnik pengumpulan data, dimana tehnik ini bertujuan menggabungkan berbagai tehnik untuk mengumpulkan data serta beberapa sumber data yang sudah ada.

Menurut (Sugiono, 2015:273) ada 3 macam triangulasi, yaitu :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan melakukan pengecekan ulang pada tingkat kepercayaan suatu informasi yang telah didapat dari berbagai sumber. Sebagai contoh perbandingan hasil pengamatan wawancara, serta perbandingan atas apa yang dikatakan baik itu bersifat pribadi dengan apa yang dikatakan secara umum, membandingkan dokumen yang ada dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi tehnik dilakukan dalam proses menguji keaslian data yang dilakukan melalui cara mengecek data terhadap sumber yang sama akan tetapi dengan menggunakan tehnik yang berbeda. Sepertihalnya data yang di dapat dengan wawancara, kemudian dicek melalui observasi atau pengamatan langsung, koesioner atau dokumentasi. Bila dengan tehnik pengujian kredibilitas data tersebut yang dihasilkan adalah data yang berbeda, maka akan ditindak lanjuti dan didiskusikan kepada sumber data yang bersangkutan, sehingga dapat diperjelas data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar namun sudut pandanganya yang berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas data. Data-data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilakukan pada pagi hari disaat pikiran narasumber masih segar, masih kurang beban pikiran dan masalah, maka akan memberi data yang valid sehingga lebih kredibel. Maka dari pada itu, dalam tahap pengujian kredibilitas jugadapat dikerjakan dengan cara pengecekan secara berulang-ulang sehingga kepastian datanya dapat ditemukan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Lokasi Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak atau yang di posisikan di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar dan mempunyai Ibu Kota Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

###### b. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bone tercatat 4.559 km<sup>2</sup> dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 328 Desa dan 44 Kelurahan, di mana Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 Kecamatan teluas dengan luas masing-masing adalah 463,35 km<sup>2</sup> (10,16%) dan 344,24 km<sup>2</sup> (7,55%). Sedangkan wilayah Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bone dengan luas 23,79 km<sup>2</sup> (0,52%).

Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Penduduk

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Km <sup>2</sup> )	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Bontocani	11	46,335	10,116	241.82	2,24
Kahu	20	18,95	4,16	595.85	5,52
Kajuara	18	12,413	2,72	491.11	4,55
Salomekko	8	84,91	1,88	222.22	2,08
Tonra	10	20,032	4,39	187.31	1,73
Patimpeng	11	13,047	2,88	244.93	2,72
Libureng	20	34,425	7,55	482.50	4,47
Mare	18	28,35	5,78	387.62	3,42
Sibulue	20	15,58	3,42	273.42	4,38
Cina	12	14,75	3,24	395.14	3,66
Barebbo	18	11,42	2.5	387.82	3,59
Ponre	9	29,3	6,43	203.02	1,88
Lappariaja	9	13,8	3.03	362.60	3,36
Lamuru	12	20,8	4,56	395.87	3,66
Tellulimpoe	11	31,81	6,98	210.08	1,49
Bengo	9	16,4	3,6	395.80	3,66

Ulaweng	15	16,167	3,55	380.69	3,52
Palakka	15	11,532	3,53	341.22	3,16
Awangpone	18	11,07	2,43	421.41	3,90
Tellusiattinge	17	15,93	3,49	591.76	5,48
Amali	15	11,913	2,61	326.77	3,03
Ajangale	14	13,9	3,05	421.61	3,90
Duaboccoe	22	14,49	3,18	454.87	4,21
Cenrana	16	14,36	3,15	339.09	3,14
T. Riattang	8	5,368	1,18	637.38	5,90
T. Riattang Barat	8	2,379	0,52	701,38	6,49
T. Riattang Timur	8	4,888	1,07	528,53	4,89

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bone

**c. Jumlah Penduduk**

Laki-laki = 356.691

Perempuan = 390.282

Jumlah total = 746.973

**d. Visi dan Misi Kabupaten Bone**

**Visi** : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu:

1. MANDIRI kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. BERDAYA SAING: mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
3. SEJAHTERA: mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Misi** : Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

#### **MANDIRI**

1. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
2. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan para medis
3. Penerapan inovasi di bidang kesehatan berbasis kearifan lokal
4. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
5. Penerapan inovasi di bidang pendidikan berbasis kearifan lokal
6. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas
7. Program pengentasan kemiskinan *by name by address*

## BERDAYA SAING

1. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (*Safety Center*)
2. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan
3. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia
4. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
5. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (*Potential Region Dashboard*)
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

### B. Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone

#### 1. Visi, Misi, Usaha, dan Tujuan Persyarikatan Muhammadiyah

##### Visi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak Tajdid yang di milikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju *terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya*.

## Misi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai misi :

1. Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Alloh SWT yang di bawah oleh para Nabi/Rasul sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad s.a.w
2. Memahami Agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam
3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an sebagai Kitab Alloh terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat

## Usaha

Muhammadiyah dalam mewujudkan Visi dan Misi geraknya menempuh langkah-langkah/usaha sebagai berikut :

1. Memprihatin dan memperdalam penyelidikan agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya.
2. Memperteguh Iman, menggemirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak

3. Memajukan dan inovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian
4. Mempergiat dan menggembirakan tabligh
5. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf
6. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntunan agama Islam
7. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama, dan kader bangsa
8. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam
9. Menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong menolong dalam kebajikan, kesehatan, social, dan pengembangan masyarakat
10. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tentang kiprah Muhammadiyah
11. Mendokumentasikan kegiatan amal usaha Muhammadiyah serta mengembangkan pustaka di lingkungan sekolah/amal usaha dan keluarga Muhammadiyah
12. Merespon perkembangan social politik yang berkembang di tengah masyarakat

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Anggaran Dasar BAB III pasal 6)

### 2. Struktru Organisasi Muhammadiyah Kabupaten Bone

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bone

Priode 2015-2020

NO.	NAMA	KTAM	JABATAN
1	Drs. H. Muh. Thahir Arfah, M.Pd.I	841206	Ketua
2	Dr. Abdullahana, S.Ag., M.H.I	300208	Wakil Ketua
3	H. Muh Jafar, S.Pd. M.Pd	209354	Wakil Ketua
4	Dr. Abdul Rahim, M.Si, MA	887918	Wakil Ketua
5	Drs. Ukkas A.R., M.Si	658342	Wakil Ketua
6	Drs. A. Surya Jaya, M.Pd.	650363	Wakil Ketua
7	Drs. Andi Jemma	650342	Wakil Ketua
8	Drs. M. Yahya, M.Ag,	1227758	Wakil Ketua
9	Dr. Abdul Hakim, M.Ag.	1227759	Sekretaris
10	Drs. Muh. Yusuf, M.Pd.	111005	Wakil Sekretaris

11	Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd.	583198	Bendahara
----	---------------------------	--------	-----------

Sumber: SK Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bone

Tabel 4.3 Personalia Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bone Priode 2015 – 2020 sebagai Koordinator Majlis dan Lembaga

No.	Nama	Koordinator/Majlis Lembaga
1	Dr. Abdul Ahana, S.Ag., M.H.I.	1. Tarjih dan Tajdid 2. Hikmah dan Kebijakan Publik
2	Drs. M. Yahya, M.Ag.	1. Tablig 2. Pelayanan Sosial 3. Lingkungan Hidup
3	H. Muh. Jafar, S.Pd, M.Pd.	1. Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Pustaka dan Informasi
4	Drs. A. Jemma	1. Pembinaan Kesehatan Umat 2. Hukum dan HAM
5	Dr. Abdul Rahim M.Si. MA	1. Ekonomi dan Kewirausahaan 2. Wakaf dan Kehartabendaan 3. Amil Zakat dan Shadaqah
6	Drs. Ukkas A.R., M.Si.	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Olah Raga dan Seni Budaya 3. Penanggulangan Bencana
7	Drs. A. Surya Jaya, M.Pd.	1. Pendidikan Kader 2. Pengembangan Cabang Ranting

Sumber: SK Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bone

### 3. Struktur Organisasi Aisyiyah Kabupaten Bone

Table 4.4 Struktur Organisasi Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bone Priode  
2015-2020

NO.	JABATAN	NAMA	NO. HP
1	Ketua	Dra. Murni Andi Beddu Usman	081355149808
2	Wakil Ketua	Sutra Ismail, S.Ag., M.Pd	085242405705
3	Wakil Ketua	Dr. Wardana, M.PdI	082335528338
4	Wakil Ketua	Darna S.Ag	085255319084
5	Wakil Ketua	A. Fausia, S.Ag	085255415533
6	Sekretaris	Murniati, Muhammad, S.Ag., M.Pd	085331248845
7	Wakil Sekretaris	Mentari, S.Pd	085298070149
8	Bendahara	Hasdawiah Latif, S.Pd	085298331779
9	Wakil Bendahara	Hj. A. Kamawati, S.Pd., M.M	085215180577
10	Ketua Majelis Tabligh	Dr. Asni Zubair, S.Ag. M.HI	085211316730
11	Ketua Majelis DikDasMen	ROSMA S.Pd	048125881
12	Ketua Majelis	Nurhaeri S.KM	081355901680

	Kesehatan		
13	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Hasna Faisal	081354758729
14	Ketua Majeiis Pembinaan Kader	Andi Suwarni, S.Pd, M.Hum	085299290950
15	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial	Waode Rusia	085255997798
16	Ketua Majelis Hukum dan HAM	Mastiawaty S.H	091342704392
17	Ketua Lembaga dan Penelitian dna Pengembangan	Andi Ina Fitriana, S.S., M.Pd	085299294554
18	Ketua Lembaga II	Hj. Rosniati, S.pd	085239672429
19	Ketua Lembaga Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Naimah Paronda, S.P.,S.Pd., M.Pd	085242368263

Sumber: SK Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bone

### **C. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berbicara persoalan Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki- laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum lakilaki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Gender sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya Perbedaan antara laki- laki dan perempuan sebenarnya dan seharusnya tidak dipermasalahkan bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi suatu masalah ketika perbedaan tersebut melahitkan ketimpangan dan ketidakadilan, karena mayoritas masyarakat memandang bahwa jenis kelamin tertentu lebih tinggi kedudukannya. dimana peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat dari peran- peran mereka dalam keluarga. Berdasarkan ideologi familialisme, peran utama laki- laki adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak- hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi sosial-keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta oleh K.H.Ahmad Dahlan. Di 'Aisyiyah Ortom khusus Muhammadiyah ada namanya Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum, dan Advokasi ( LHOHA) bertujuan untuk membangun dan menjalin hubungan

kerjasama dalam rangka memperluas sayap gerakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lembaga Humas dan Penerbitan bertujuan untuk mengkomunikasikan segala kegiatan, program serta kebijakan organisasi kepada pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal serta membentuk citra positif Aisyiyah di masyarakat luas. Berkaitan dengan gender, Aisyiyah merupakan mitra bagi Muhammadiyah untuk melakukan dakwah di masyarakat. Mitra ini terus dibangun untuk peningkatan dakwah serta pengabdian pada masyarakat. perempuan terkait dengan kesetaraan gender dimana perempuan mempunyai akses serta kontrol dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kedudukan pada struktur organisasi. Dalam organisasi otonom Muhammadiyah yaitu Aisyiyah kaitannya dengan peran yang dilakukan dalam kesetaraan gender.

Muhammadiyah paling tidak memiliki peran dalam tiga dataran: “sebagai gerakan pembaruan, sebagai agen perubahan sosial, dan sebagai kekuatan politik” ketiga atribut yang disematkan kepada Muhammadiyah berupaya menghadirkan pemikiran-pemikiran inovatif dan kritis terhadap *status quo*, sehingga eksistensinya juga sekaligus membaawa transformasi sosial, terutama melalui modernisasi sistem pendidikan Islam. Seiring dengan kekuatan yang semakin diperhitungkan, terutama dikalangan perkotaan, keberadaan Muhammadiyah juga patut diperhitungkan secara politik, meskipun *khiththah* (garis dan orientasi perjuangan) organisasi ini tidak berpolitik praktis

Adapun surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pusat Nomor 41/KEP/1.0/B/2013, yaitu :

“pimpinan persyarikatan, pimpinan unsur pembantu pimpinan persyarikatan, pimpinan organisasi otonom, pimpinan badan pengurus harian, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD di nyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota pimpinan persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di AUM, Baik yang bersangkutan berhasil atau tidak dalam percalonan tersebut”

## 1. Akses

Akses merupakan kosakata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *access* yang berarti jalan masuk. hal yang penting untuk mendapatkan suatu manfaat di dalam dunia politik, akses berarti jalan atau izin masuk ke suatu tempat/wilayah baik yang dapat dilihat dengan mata atau tidak di mana kita dapat berhubungan dengan sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut sesuai dengan izin yang dimiliki, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan kita harus mencari bagaimana akses untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Aisyiyah tentang apakah Aisyiyah di beri akses untuk ikut dalam partai politik. Bahwa:

*“Semua orang memiliki akses karena di undang-undang pemilu tidak ada batasan siapapun sebagai warga Negara berhak untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik selama ada kemampuan untuk maju, tapi kita melihat realita yang ada di bone sepertinya perempuan hanya dijadikan pelengkap saja. Namun kita sebagai organisasi Muhammadiyah/’Aisyiyah yang tidak berpolitik praktis tapi mendorong anggotanya ikut berpolitik. jadi saya fikir kita di aisyyiah adalah perempuan berkemajuan karena mendapat dorongan dari Organisasi Muhammadiyah itu sendiri”* (Hasil Wawancara HM, 9 juni 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa setiap warga Negara memiliki Hak untuk ikut serta dalam dunia politik, hal ini sebenarnya dapat kita gunakan untuk berpeluang masuk dalam dunia politik sebab tidak ada keterbatasan siapa pun untuk berpolitik baik itu Laki-laki maupun Perempuan,

hanya saja ada yang selalu berpandangan bahwa partai politik hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan objek, padahal seharusnya menjadi subjek, dan yang menjadi syarat agar partai politik ikut serta dalam pemilu harus menyertakan keterwakilan perempuan 30%, yakni setiap tiga bakal calon legislatif, terdapat minimal satu calon legislatif perempuan, namun hal itu masih banyak yang menganggap perempuan sebagai objek saja. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam akses maupun kebijakan namun hasilnya belum memuaskan. Dan berikutnya kita dapat melihat tanggapan dari Ketua Hukum dan Ham tentang apakah Aisyiyah memiliki akses untuk berperan dalam dunia politik, ia mengatakan bahwa:

*“Kita di Aisyiyah sangat di dukung untuk berpolitik bahkan kita di dorong untuk menyebar ke semua partai politik. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu A. Yuliani Paris adalah kader Aisyiyah yang masuk ke dalam partai PAN ia sangat di dukung oleh kami anggota Muhammadiyah maupun Aisyiyah dan karena memang Ibu A. Yuliani Paris memiliki kemampuan di bidangnya”*  
(Hasil Wawancara MW, 12 Juni 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan adanya partisipasi atau pengaruh besar para tokoh Muhammadiyah terhadap perjalanan Politik di Indonesia. Dalam organisasi Muhammadiyah apa lagi di Kabupaten Bone ternyata sangat mendukung jika ada anggota Aisyiyah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, karena memang di Aisyiyah sendiri tidak pernah mempermasalahkan tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik sekalipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa dipimpin dan hanya bisa mengurus urusan rumah tangga, namun di Aisyiyah sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Karena fokus gerakan Aisyiyah adalah pemberdayaan perempuan, dengan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Aisyiyah di

Kabupaten Bone selalu mendukung dan mendorong memberi semangat sesamanya.

## 2. Kontrol

Kontrol adalah alat untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu system. Kontrol sering diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian, kontrol menjadi salah satu nilai dalam masyarakat, pada hakikatnya dalam kehidupan masyarakat perlu ada keseimbangan, supaya kehidupan masyarakat tercipta sesuana tertib aman dan damia sesuai dengan tujuan hidup bersama. Kontrol harus diberikan sama terhadap laki-laki dan perempuan, berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana cara mengontrol anggota Persyarikatan muhammadiyah

*“Seperti yang kita ketahui kan Muhammadiyah memang bukan partai politik tetapi Muhammadiyah memberikan anggotanya kesempatan baik laki-laki maupun perempuan karena jika dilihat secara subyek dan obyek laki-laki dan perempuan itu setara untuk sama-sama dipertimbangkan kebutuhan secara spesifik, di samping itu juga Muhammadiyah tetap mengontrol anggotanya yang ikut dalam partai politik karena ketika ada yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maka akan diberhentikan sesuai dengan keputusan yang ada di Muhammadiyah, dan saya akui anggota Muhammadiyah identik dengan Partai PAN karena ada anggota Muhammadiyah maupun Aisyiyah yang ikut bergabung di Partai PAN” ( Hasil Wawancara HR, 10 Juni 2019)*

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa di setiap organisasi tentu semua anggotanya di kontrol, dan sebagaimana yang kita ketahui di dalam mengontrol sebuah Organisasi kita tidak bisa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, kita harus memberikan masukan, sumbangsi dan arahan yang sama bagi ke duanya. Wanita dan pria memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi fisik biologis, maupun dari segi fisik psikologisnya. Perbedaan tersebut

merupakan sumber dari perbedaan fungsi dan peran yang diemban wanita dan pria. Jika memperhatikan perbedaan yang peran dan fungsi yang diembannya, maka akan terlihat bahwa pergerakan/perjalanan yang dilakukan oleh wanita memiliki pola yang berbeda dengan pergerakan/perjalanan yang dilakukan oleh pria. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Setarak baik sebagai subyek maupun obyek, setara untuk sama-sama diertimbangkan kebutuhannya spesifiknya, juga setara untuk masuk dan terlibat dalam proses, merasakan hasil *output* dan *outcomes* maupun menerima *distribution resources*. Laki-laki dan perempuan sam-sam memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan: pengambilan keputusan politik, ketenaga kerjaan dan pengentasan kemiskinan. Perlibatan laki-laki dan perempuan secara seimbang, dengan demikian adalah kebutuhan. Dan terkait mengenai surat keputusan yang dimaksud bahwa ketika ada anggota Muhammadiyah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maka akan di keluarkan surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pusat Nomor 41/KEP/1.0/B/2013. Dan berdasarkan hasil wawancara terkait cara mengontrol diri sendiri sebagai anggota Muhammadiyah yang ingin ikut berpolitik menyatakan bahwa :

*“Sebenarnya sebagian Perempuan masih terbawa dalam pemikiran patriarkhi. Keberanian dari seorang perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dengan orang banyak atau masyarakat masih sebatas administrasi, bukan sifatnya sebagai pencetus ide atau pemberi kebijakan yang bisa berdampak kepada perempuan lainnya, namun saya sebagai perempuan tidak pernah memikirkan hal demikian, saya mengikuti sosialisasi tentang politik dan saya sendiri juga berpolitik, saya tidak pernah memikirkan tentang perempuan yang seharusnya di rumah saja mengurus urusan rumah tangga, tapi saya memikirkan bagaimana saya bisa menjadi perempuan yang ikut dalam dunia politik”* (Hasil Wawancara MW, 12 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari responden perempuan di atas dapat di katakana bahwa dalam kaitannya dengan kontrol (kekuasaan) terhadap peraturan yang ada perempuan lebih tidak berdaya, karena di dalam pemikiran perempuan masih ada melekat yang namanya budaya patriarkhi. Semua dikuasai oleh pria, mulai dari menjadi pemimpin di dalam dunia politik maupun menjadi kepala rumah tangga. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik karena masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar Indonesia, pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kuasa laki-laki, karena laki-laki lebih berkuasa, kuat, rasional sehingga cocok menjadi pemimpin. Akibatnya perempuan jadi termarginalkan (terpinggirkan) bukan saja di tempat kerja tetapi juga di rumah tangga, masyarakat atau kultur, bahkan Negara.

### 3. Partisipasi

Partisipasi secara bahasa di artikan sebagai pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga Negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, semua orang akan di kuasa oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bone mengenai partisipasi Aisyiyah menyatakan bahwa :

*“Sebetulnya Muhammadiyah tidak berpolitik karena Muhammadiyah bukan partai politik, itu khittah muhammadiyah di makassar dulu, cuma sekarang kader-kadernya warga muhammadiyah di dorong, jadi secara organisasi mereka tidak berpolitik tetapi secara individu mereka di dorong untuk politik. Jika berbicara tentang partisipasi Aisyiyah dalam dunia politik yaitu ada kecenderungan rendah di bandingkan laki-laki. Pasalnya, mereka*

*lebih banyak melibatkan diri dalam urusan rumah tangga atau domestik. Namun kita di Muhammadiyah tidak pernah membatasi perempuan ikut berpartisipasi dalam dunia politik” (Hasil Wawancara TA, 1 juni 2019)*

Dari hasil wawancara dapat di gambarkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah masyarakat yang tidak brpolitik praktis, namun tetapi Muhammadiyah mendorong masyarakatnya bekerja sama dengan pihak manapun kebaikan dan kemaslahatan serta menciptakan ketertiban dalam dunia politik, dan perempuan mempunyai keterbatasan dalam ikut berpartisipasi dalam dunia politik karena lebih melibatkan diri di dalam urusan rumah tangganya, sebaigian perempuan juga berfikiran bahwa hanya laki-laki yang dapat jadi pemimpin namun sebenarnya perempuan juga mempunyai peluang untuk beraprtisipasi dalam dunia politik. Di bawah ini dapat kita lihat tanggapan Ketua Hukum dan Ham Aisyiyah Kabupaten Bone tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik, bahwa:

*“Saya sebagai perempuan aktivis bekerja sebagai ketua pemerhati anak dan pemberdayaan perempuan serta menjadi ketua HAM Aisyiyah ikut berpartisipasi dalam dunia politik walaupun saya juga sebagai ibu rumah tangga. Saya sudah mencalonkan diri selama 2 periode namun tidak pernah berhasil tetapi setidaknya saya ikut berpartisipasi dalam dunia politik, dan saya melihat bahwa perempuan yang ingin ikut berpartisipasi terkendala dengan perekonomiannya serta ada larangan dengan suami, apalagi tidak mudah untuk menduduki suatu jabatan di DPRD, sekarang kalau kita tidak mempunya uang 500 juta kita tidak bisa lolos untuk menjadi anggota DPRD” (Hasil Wawancara MW, 12 juni 2019)*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat minim, sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Pemilhan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun hal itu masih jauh

dengan apa yang menjadi landasan Undang-undang di atas, itu disebabkan karena adanya fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu keadaan ekonomi keluarga, partisipasi perempuan saat ini, bukan hanya sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia, dan dapat juga dikatakan bahwa cara untuk menduduki kursi DPRD seseorang harus mempunyai uang jutaan rupiah, itulah yang sampai sekarang tidak bisa lepas dari masa ke masa. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Aisyiyah tentang ada berapa anggota Aisyiyah yang ikut berpartisipasi pada periode yang lalu dan yang sekarang bahwa:

*“sepengetahuan saya dari periode kemarin dan sekarang partisipasi anggota Aisyiyah hanya satu orang atas nama Mastiawaty S.H, dia sudah dua kali mencalonkan namun tidak pernah lolos, dan setahu saya Muhammadiyah identik dengan Partai PAN karena ada anggota Muhammadiyah maupun Aisyiyah yang ikut bergabung di Partai PAN”*  
(Hasil Wawancara HM, 9 Juni 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah memiliki kemajuan besar karena adanya Ijtihad Amien Rais yang membentuk Partai Amanat Nasional, sekalipun akhirnya antara PAN dan Muhammadiyah tampak berjalan sendiri-sendiri, dan itu sebenarnya disebabkan adanya dialog yang tidak selalu berjalan dengan “mulus dan dialektis” sehingga kadang muncul pula paradoks antara aktivis PAN dan Muhammadiyah sebagai ormas yang jamaahnya paling banyak mendukungnya. Partisipasi anggota Aisyiyah sampai sekarang masih minim itu disebabkan karena adanya pemikiran seperti yang dijelaskan pada respon sebelumnya bahwa perempuan masih berfikir tentang budaya patriarki, hal itu menjadi kendala partisipasi perempuan dalam dunia politik, namun tidak dengan Anggota Aisyiyah yang satu ini, dia sudah dua kali

mencalonkan diri di kursi DPR RI namun tidak pernah lolos, tapi semangatnya tidak pernah luntru untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Keterlibatan perempuan yang sudah kentara tetapi secara jelas belum di akui di Indonesia membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga.

#### 4. Manfaat

Manfaat adalah yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Manfaat juga dapat di artikan sebagai hal atau cara hasil kerja dalam pemanfaatan sesuatu yang berguna, manfaat-manfaat yang di peroleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu. Berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana cara menanggapi manfaat yang di berikan dalam kesetaraan gender dalam perspektif politik di Muhammadiyah, bahwa:

*“Menurut saya Muhammadiyah adalah organisasi yang terbuka menerima pandangan-pandangan apa lagi persoalan gender politik di Muhammadiyah, artinya selama tidak bertentangan dengan Islam sebagai Al-qur’an dan Sunnah. Kita di Muhammadiyah maupun aisyiyah terbuka menerima masukan dan pandangan dari elemen, saya fikir Muhammadiyah tidak kaku jika berbicara persoalan politik apa lagi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa agar selalu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” (Hasil Wawancara BB, 10 Juni 2019)*

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa Muhammadiyah selalu menerima masukan atau pandangan dari orang-orang tertentu, baik itu mengenai dengan dunia politik maupun dalam lingkup Muhammadiyah, sekalipun itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dari pernyataan di atas juga dapat dikatakan akomodasi yang dirumuskan kuota politik perempuan adalah 30% dari pencalonan perwakilan rakyat, sebagaimana yang di

jelaskan di atas tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupsten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dan berdasarkan hasil wawancara tentang adanya manfaat yang di berikan dari organisasi tentang Kesetaraan Gender maupun Politik bahwa :

*“Ada, misalnya pembekalan calon anggota legislatif bagi perempuan dan bagi laki-laki karena setiap anggota yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tentunya di berikan pembekalan, kita melakukan sosialisasi dan tidak ada diskriminasi bahwa dia perempuan maupun dia laki-laki”* (Hasil Wawancara HM, 9 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa dalam dunia politik memang kita perlu yang namanya pembekalan serta sosialisasi mengenai politik tersebut. Untuk melaksanakan ataupun mengikuti pembekalan seharusnya memang melibatkan semua oknum-oknum yang ikut berpolitik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mengenai dengan manfaat dalam organisasi Muhammadiyah tentunya organisasi ini mempunyai banyak manfaat yakni dengan memberikan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan Muhammadiyah. Program-program yang mengenai kesetaraan gender yaitu pemberian pendidikan HAM, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan politik kepada para anggota serta kader Muhammadiyah ataupun Aisyiyah untuk memberikan pemahaman tentang gender agar mereka terakomodir baik dalam kepengurusan Muhammadiyah maupun dalam lingkup politik.

Melihat dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat dikatakan Muhammadiyah jika dilihat dari pandangan politik yaitu politik praktis sebenarnya bukan wilayah Muhammadiyah. Namun Persyarikatan Muhammadiyah tidak alergi politik. Muhammadiyah sampai saat ini masih berpegang teguh pada *khittahnya* sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dalam kepribadian Muhammadiyah, organisasi ini bukanlah partai politik, namun bukan berarti persyarikatan ini antipolitik dan tidak paham politik. Dan melihat kesetaraan gender di dalam organisasi Muhammadiyah sebenarnya tidak dipermasalahkan terlebih jika berbicara tentang partisipasi anggotanya di dalam dunia politik. Dari beberapa anggota Aisyiyah di Kabupaten Bone hanya ada satu orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama 2 periode namun dia tidak pernah lolos, hal itu karena adanya masalah ekonomi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di Kabupaten Bone politik tanpa uang kita tidak bisa duduk di kursi parlemen, seperti halnya sekarang yang membuat orang-orang lolos menduduki kursi parlemen karena adanya money politik, yang mayoritas menggunakan money politik itu laki-laki karena pasca pemilihan ulang yang dilakukan di salah satu kelurahan ada caleg yang menyogok warga dengan jumlah uang yang sangat besar, ada juga yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan di kantor, hal ini sangat susah dijangkau bagi perempuan yang mencalonkan diri namun ekonominya rendah.

Di Indonesia aturan kuota minimal 30% bagi perempuan yang duduk di kursi legislasi hingga saat ini belum tercapai kualitas yang memenuhi standar berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku

pengambil kebijakan di ranah politik. Keterwakilan perempuan di bidang politik tidak meningkat secara signifikan pasca ditetapkannya UU No 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Partai Politik yang mengharuskan parpol memenuhi kuota minimal 30% untuk caleg perempuan sebagai syarat mengikuti pemilu, dengan melihat data tahun 1990 sebanyak 11%, tahun 2004 sebanyak 8%, tahun 2009 18%, dan tahun 2014 sampai 2019 sebesar 17,6%. Perempuan terjun dalam dunia politik hanya sebagai pelengkap saja, secara keterlibatan masih sangat jauh perannya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun Muhammadiyah selalu mendorong anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik, Muhammadiyah di Kabupaten Bone sangat terbuka jika berbicara persoalan Politik terlebih jika membahas persoalan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik.

1. Akses : Muhammadiyah selalu memberi ruang ataupun akses bagi kaum laki-laki bahkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam partai politik, karena Muhammadiyah tidak pernah mendiskriminasi Anggotanya jika ada yang ingin maju untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
2. Kontrol : Mengontrol anggota Muhammadiyah yang masuk caleg kita melihat surat keputusan yang dimaksud bahwa ketika ada anggota muhammadiyah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maka akan di keluarkan surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pusat Nomor 41/KEP/1.0/B/2013
3. Partisipas : Perempuan mempunyai keterbatasan dalam ikut berpartisipasi dalam dunia politik karena lebih melibatkan diri di dalam urusan rumah tangganya, sebgaiian perempuan juga berfikiran bahwa hanya laki-laki yang

dapat jadi pemimpin namun sebenarnya perempuan juga mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam dunia politik

4. Manfaat : Organisasi Muhammadiyah melakukan program-program sebagai manfaat mengenai kesetaraan gender yaitu pemberian pendidikan HAM, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan politik kepada kepada para anggota serta kader Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah sendiri di bagi menjadi beberapa organisasi otonom khusus yang di dalamnya terdapat organisasi otonom khusus laki- laki dan organisasi perempuan, kedua persyarikatan bersama- sama di beri manfaat mensosialisasikan kesetaraan gender terutama dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik secara umum masih sekecil diskursus, harapan dan kenyataan sangat jauh di lapangan, karena masih banyak perempuan di Indonesia yang memikirkan budaya patriarki, namun di dalam sosialisasi kesetaraan gender ini dilakukan oleh Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah. Dengan adanya sosialisasi kesetaraan gender ini sudah ada Anggota Aisyiyah yang ikut serta dalam berpolitik bahkan Dengan adanya sosialisasi kesetaraan gender ini timbul peran kesetaraan gender dari Aisyiyah itu sendiri dalam hal ini Pimpinan Daerah Aisyiyah.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh Pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Bone, hendaknya mengakomodir semua anggota Muhammadiyah baik di kalangan Pemuda Muhammadiyah bahkan simpatisan Muhammadiyah yang sudah memiliki KTA yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

2. Kepada pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah agar selalu melakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender dalam pespektif politik, namun jangan hanya dalam lingkup Muhammadiyah saja tapi dalam lingkup keseluruhan/umum agar semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat memotivasi dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik



## DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., & Harahap, M. A. 2018. *Komunikasi Politik dan keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. Perspektif Komunikasi.*
- Abdullah, A. 2015. *Pengaturan Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Kesetaraan dan keadilan gender (RUU KKG) di Indonesia.* Pandangan Muhammadiyah terhadap Perempuan
- Burhan Bungin, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Cetakan 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Carlton Clymer Rodee et al. 2002. *Pengantar Ilmu Politik.* Cet, 5. Rajawali Press. Jakarta
- Camelia, I. D. 2018. *Sistem Politik Indonesia.* Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan\_Fakultas Ilmu Sosial UM
- Dr. Tijani Abd. Qadir Hamid, 2001. *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an,* Gemal sani Press.
- Gabriel A. Almond et al. 2004. *Comparative Politics Today: a World View.* Eight Edition. Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc.
- Jurdi, S. 2011. *Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1966-2006*
- Khoiri, N. 2013. *Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah.*
- Kertati, I. 2014. *Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen.*
- Lih. Mh. Djaldan Badawi (ed), 1998. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, 1912-1985,* Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Nasip, A. 2017, June. *Imagologi Dalam Perspektif Gender Pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Nahdlatul Wathan (Nw).* In *Proceedings Education and Language International Conference.*
- Nasaruddin Umar, 2001 *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an.* Jakarta:Paramadina.
- Nashir, H., Azra, A Ismail, F., Kompas, T.W., Azizy, A, Q. A., Roosita, E., & Nugraha, P. 2000. *Muhammadiyah "digugat" Reposisi di tengah Indonesia yang berubah*
- Nimmo, 1989, *komunikasi politik, khalayak dan efek,* Bandung, Refika Aditama

- Nugroho, Rian. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005 “*Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tentang Anggaran Rumah Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Malang. Tahun Langkah Perjuangan (tt)
- Qodir, Z., Nurmandi, A., & Yamin, M. N. 2015. *Ijtihad politik Muhammadiyah: politik sebagai amal usaha*.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Garudhawaca : Yogyakarta
- Silvana, N. 2013. *Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif*. Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- JURNAL**
- Dzuhayatin, S. R. 2012. *Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah*. Mus ,wa Jurnal Studi Gender dan Islam.
- Suryadi, S. 2017. *Partisipasi Politik Perempuan Indonesia dalam Relasi Gender*. Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi.
- Suryani, E. 2010. *Sosialisasi Kesetaraan Gender Pada Pegawai Kantor Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi*. Kybernan (Jurnal Ilmu Pemerintahan).
- Susanti, E. 2013. *Analisis Ketidakadilan Gender pada Tokoh Perempuan dalam Novel “Kupu-Kupu Malam” Karya Achmad Munif*. Jurnal Artikulasi.
- Sutarto, D. 2017. *Gender Politik dan Agama*. Jurnal Trias Politika.
- Wahid, W. G. A. 2012. “*Membaca*” *Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah*. Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam.
- Zakaria, S. (2013). *Kepemimpinan perempuan dalam persepektif hukum islam (studi komparatif antara pemikiran kh. Husein muhammad dan prof. Siti musdah mulia)*. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa UII*

**UNDANG-UNDANG**

2012. undang-undang republic Indonesia nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2)  
tentang keterwakilan perempuan



L

A

M



P

I

R

A

N

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASTIAWATY, SH  
 Pekerjaan : KETUA MAJELIS HUKUM DAN HAM 'AISYIYAH  
 Alamat : Jl. BALI

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudari:

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
 Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul;

**“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 12, Juni 2019

Informan

  
 MASTIAWATY, SH

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN, ST  
Pekerjaan : ANGGOTA LEGISLATIF  
Alamat : BONE SELATAN

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudari:

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul;

**“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,

Mei 2019

Informan

  
Herman, ST

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H M. TAHIR ARFAH MPdI  
 Pekerjaan : DOUGEN IAIN BONE  
 Alamat : JL. MT. HARYONO Lt I IMARANANG

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
 Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul;

**“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,

Mei 2019

Informan

Ketua Mu Laman ediyot  
 BONE

DR. H M. TAHIR. A. MPdI



**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Badaruddin Baso OM. SE. MM*  
Pekerjaan : *sekretaris Amal usaha*  
Alamat : *Welalang'e*

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudari:

Nama : *Tenriawaru Septiananinda Amran*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan*  
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*  
*Universitas Muhammadiyah Makassar*

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul;

**“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, Mei 2019

Informan

*Badaruddin Baso OM. SE*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1392/05/C.4-VIII/III/1440/2019

05 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bone

di –

Bone

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1094/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 10 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **TENRI WARU SEPTIANANINDA AMRAN**

No. Stambuk : **10564 02196 15**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1621/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Mengadakan Observasi dan Pengumpulan Data Awal Pra Penelitian

Kepada  
 Yth. : Bapak /Ibu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bone  
 Di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar di bawah ini :

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
 NIM : 10564 02196 15  
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Penelitian : Gender dan Politik dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone

Untuk melengkapi tugas akhir penulisan skripsi maka yang bersangkutan mengadakan observasi dan pengumpulan data awal sebelum mengadakan penelitian olehnya itu kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu mahasiswa tersebut.

Demikian permohonan ini atas perhatian, kerjasama dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Oktober 2018

Mengetahui,  
 Wakil Dekan I,



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si  
 NBM : 1084 366



**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professional - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email : [fisip@unismuh.ac.id](mailto:fisip@unismuh.ac.id)  
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 1094 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -

Makassar  
72233  
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Tenriwaru Septiananinda Amran

St a m b u k : 105640219615

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bone.

Judul Skripsi : *"Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katztraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 10 Mei 2019

D e k a n,  
Ub. Wakil Dekan I

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si  
NBM. 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



# PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BONE

Alamat : Jl. Onta No. 11 Telp. (0481) 26626 PO.BOX. 139 Watampone 92732

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 055/III.0/KET/1440

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. Tahir Arfah, M.Pd.I.  
Jabatan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bone  
NBM : 841206

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
NIM : 10564 02196 15  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul "**Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone.**"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Syawal 1440 H  
27 Juni 2019 M

Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Kabupaten Bone  
Ketua

Drs. H. Muhr Tahir A, M.Pd.I.  
NBM. 841206

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MURNI  
Pekerjaan : Ketua PDA Bone  
Alamat : JL. MT. HARYONO

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudari:

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone,

Mei 2019

Informan

  
Dra. MURNI A. BEDDUSMAN



Lampiran gambar 1.1 : wawancara bapak Drs. H. M. Tahir Arfah M.Pdi (Ketua Pimpinan Muhamamadiyah Kabupaten Bone)



Lampiran gambar 1.2 : wawancara bapak Badaruddin Baso Om, S.E M.M (Sekretaris Majelis Amal Usaha Muhammadiyah Bone)



Lampiran gambar 1.3 : wawancara Ibu Mastiawati, S.H (Ketua Majelis Hukum dan Ham Aisyiyah Bone)



Lampiran gambar 1.4 : wawancara bapak Herman S.T (Anggota Legislatif Partai Pan)



Lampiran gambar 1.5 : wawancara Ibu Hj. Murni (Ketua Aisyiyah Bone)

